

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada pelaksanaan proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia terjadi akibat hubungan kerja sama dengan pola ketergantungan finansial yang dibangun berdasarkan investasi infrastruktur berdampak negatif pada aspek HAM. Ketergantungan yang mendalam antara Indonesia (negara pinggiran) dan Tiongkok (negara pusat) menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM seperti pengusuran, pengabaian hak tenaga kerja, dan pencemaran lingkungan, tanpa adanya perlindungan yang memadai bagi masyarakat lokal. Penelitian ini menemukan bahwa proyek-proyek infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia telah menghasilkan berbagai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung melanggar hak asasi manusia (HAM).

Studi kasus Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menunjukkan bagaimana pengabaian terhadap aspek lingkungan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak atas air bersih, tempat tinggal layak, dan lingkungan hidup yang sehat. Proyek IMIP di Morowali memperlihatkan pola pelanggaran HAM dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, buruknya sistem keselamatan kerja, dan diskriminasi terhadap pekerja migran. Sementara itu, PLTU Celukan Bawang mencerminkan kerusakan ekologis, penghilangan sumber

penghidupan tradisional, dan lemahnya akuntabilitas perusahaan serta negara dalam proses ganti rugi lahan dan relokasi warga. Adapun pembangunan KIH Kalimantan Utara memperlihatkan ketimpangan akses atas ruang hidup, degradasi lingkungan pesisir, dan konflik agraria yang belum terselesaikan secara adil.

Keempat studi kasus tersebut menegaskan bahwa pelanggaran HAM bukan merupakan penyimpangan teknis semata, melainkan bagian dari struktur pembangunan yang menempatkan kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi di atas perlindungan hak-hak warga. Minimnya partisipasi publik, lemahnya pengawasan negara, serta ketidakadilan distribusi manfaat dan beban pembangunan merupakan akar dari problematika ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap model pembangunan BRI di Indonesia agar sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional tidak hanya menjanjikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal.

Dampak negatif terhadap HAM dalam proyek BRI di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara struktur global yang eksploitatif, fungsi sistem ekonomi-politik yang mengabaikan nilai kemanusiaan demi kelangsungan investasi, dan pilihan rasional aktor-aktor yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dan keuntungan jangka pendek. Ketergantungan finansial yang ditanamkan oleh BRI telah menciptakan ekosistem pembangunan yang tidak demokratis dan mengabaikan perlindungan sosial

masyarakat lokal, menempatkan HAM sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan di bawah tekanan kebutuhan ekonomi.

4.2. Saran

Penulis menawarkan sejumlah saran praktis yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penelitian. Pertama, bagi pemerintah Indonesia, penting untuk memperkuat posisi tawar dalam kerja sama internasional, khususnya dalam proyek-proyek BRI, agar tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga melindungi kepentingan sosial dan kemanusiaan. Pemerintah perlu menegosiasikan klausul perlindungan HAM secara eksplisit dalam setiap kontrak proyek dan memperkuat pengawasan serta akuntabilitas terhadap pelaksanaan proyek, termasuk melibatkan masyarakat sipil dan institusi independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan HAM. Selain itu, regulasi nasional terkait perlindungan tenaga kerja dan lingkungan harus diperkuat dan ditegakkan secara konsisten, terutama terhadap perusahaan asing yang beroperasi di sektor strategis. Kedua, bagi investor asing dan korporasi Tiongkok yang terlibat dalam proyek BRI di Indonesia, perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM sebagaimana tercantum dalam *Baseline Study on the Human Rights Impacts and Implications of Mega-Infrastructure Investment* yang ditulis oleh OCHCR (2017). Penghormatan terhadap hak-hak pekerja lokal, jaminan keselamatan kerja, dan penghindaran praktik diskriminatif atau kerja paksa harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal secara

bermakna dalam setiap tahapan proyek juga sangat penting, khususnya melalui mekanisme persetujuan berdasarkan informasi awal (free, prior, and informed consent) agar hak-hak masyarakat terdampak benar-benar dihormati. Ketiga, bagi masyarakat sipil dan lembaga HAM, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas advokasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek BRI di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan dengan menghimpun data lapangan, menyuarakan kasus pelanggaran, serta memberi tekanan kepada negara agar menjalankan komitmennya terhadap perlindungan HAM. Selain itu, penting untuk mendorong pembentukan mekanisme pengaduan khusus bagi masyarakat terdampak proyek BRI, baik melalui mekanisme nasional maupun forum internasional, sebagai saluran formal untuk memperoleh keadilan

Terakhir, bagi akademisi dan peneliti, penting untuk mengembangkan studi lintas disiplin yang lebih mendalam tentang dampak proyek BRI, dengan menggabungkan perspektif ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Penelitian komparatif dengan negara-negara lain yang juga menerima investasi BRI, seperti di kawasan Afrika atau Asia Selatan, juga dapat memberikan perspektif tambahan dan pelajaran kebijakan yang relevan bagi Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong praktik kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam kerja sama internasional di era globalisasi.